

KRITISI TERHADAP KEGAGALAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA

Istiana HERMAWATI

Peneliti pada Balatbangsos, Departemen Sosial, Jakarta

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1997 dan berkembang menjadi krisis multidimensi yang berlangsung hingga saat ini, mengindikasikan rapuhnya struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan hankam yang semula menjadi tiang penyangga keutuhan dan ketahanan bangsa dan negara. Setelah dikaji secara mendalam, ternyata hal ini dilatar belakangi oleh penerapan model pembangunan yang lebih bersifat *ekadimensi* (hanya memprioritaskan sektor ekonomi dalam berbagai manifestasi dan konsekuensi logisnya), sehingga menimbulkan *distorsi* pada sektor-sektor lain yang terabaikan. Demikian halnya dengan pendekatan pembangunan yang bersifat *top down*, cenderung *sentralistik* dan *otoriter* telah menyebabkan masyarakat mengalami *deempowerment* sehingga kapasitasnya tidak bisa berkembang, kreativitas komunitas lokal menjadi tumpul dan mereka kehilangan sikap kritis dan kemampuan reflektifnya, yang semenstinya menjadi sarana kontrol untuk mengoreksi pelaksanaan pembangunan yang sarat dengan penyimpangan-penyimpangan dan melahirkan ketimpangan-ketimpangan serta ketidakadilan sosial yang begitu kompleks.

Sebagai koreksi terhadap kegagalan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan ORBA, maka direkomendasikan untuk diterapkan model pembangunan sosial, yang pada hakikatnya merupakan pengintegrasian antara pembangunan sosial dan ekonomi, dan mencakup seluruh aspek/domain yang ada (politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum), sehingga semua aspek yang terkait dalam pembangunan dapat dikembangkan secara optimal dan distorsi di berbagai aspek pembangunan dapat diiadakan dan atau diminimalisir. Model ini bertumpu pada upaya-upaya untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan (empowerment), penguatan institusi lokal, dan bersifat *proaktif* dan *partisipatif*, sehingga pendekatan yang diambil lebih bersifat *bottom up*. Dengan model ini diharapkan masalah kemiskinan dapat teratasi, distribusi keadilan dapat terpenuhi dan partisipasi masyarakat dalam program pemabngunan dapat ditingkatkan karena digali dari permasalahan real yang mereka hadapi dan atau kebutuhan yang mereka rasakan. Dengan kata lain, pembangunan sosial menempatkan aspek manusia/masyarakat sebagai sentral/subyek dari pembangunan yang dilaksanakan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

1. PENDAHULUAN

Esensi dari pembangunan semestinya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh semakin kecilnya jumlah penduduk miskin, menurunnya angka pengangguran dan ma-

kin kecilnya ketimpangan-ketimpangan diberbagai bidang. Tetapi yang terjadi di Indonesia tidaklah demikian. Memang, secara sekilas pembangunan yang dilaksanakan Orde Baru menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal ini ditandai dengan tingginya GNP Perkapita yang mengindikasikan tingginya pertumbuhan ekonomi Indone-

sia, Bank Dunia (1995) pernah melaporkan bahwa Indonesia menempati posisi kelompok negara menengah ke bawah dengan rincian \pm US\$ 1000 untuk GNP Perkapita dan 6% untuk angka pertumbuhan *Product Domestic Bruto*(PDB) selama satu dasa warsa. Pada tahun 1993, angka pertumbuhan tersebut adalah 6,5%; tahun 1994 7,5%; tahun 1995 adalah 8,1% dan tahun 1996 adalah 7,8%; bahkan pada tahun 1997 awal pertumbuhan ini mencapai 8,5-9% (dari berbagai sumber). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia dimasa Orde Baru mengalami kenaikan yang relatif stabil. Namun, kenaikan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ini ternyata tidak menjamin pemerataan pendapatan, artinya hanya elit kekuasaan dan kroni-kroninyalah yang menikmati hasil pembangunan ini, dan struktur politik dan hukum yang ada dikembangkan untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka serta untuk mengabadikan *status quo* yang ada. Sementara sebagian besar rakyat lainnya masih hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan dan pengangguran. Menurut Data Biro Pusat Statistik (1999), jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 1998 masih sekitar 49,5% dan pada tahun 1999 sekitar 48,4% dari penduduk keseluruhan. Sedangkan jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 1999 menurut catatan Kompas (1999) ada sekitar 6,2 juta orang.

Kenyataan sebagaimana disebutkan di atas sangat ironis sekali, artinya keberhasilan ekonomi yang menjadi diskursus Orde Baru tidak menjamin peningkatan kesejahteraan bagi semua penduduk, dan konsep *Trickle Down Effect* ternyata dalam kenyataannya tidak seperti yang diharap-

kan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional (yang tercermin dari kenaikan GNP) tidak signifikan dengan realitas di masyarakat. Chaniago (2001), menyimpulkan bahwa Indonesia telah gagal melaksanakan pembangunan, sebab pembangunan yang dilaksanakan justru melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan di berbagai bidang, menghancurkan modal sosial yang semula menjadi tiang penyangga ketahanan dan keutuhan Bangsa Indonesia, kekacauan tata ruang, merosotnya etika sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan sebagainya. Chaniago menuding bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan di Indonesia adalah Pemerintah Orde Baru, karena telah menerapkan model pembangunan dengan mengabaikan aspek manusiawi dan bidang lain di luar ekonomi, sehingga menimbulkan banyak distorsi di berbagai bidang; menerapkan sistem sentralistik dan strategi *Top Down*, sehingga menumpulkan komunitas dan kreativitas daerah untuk mengembangkan kapasitasnya sesuai potensi yang dimiliki; mengabaikan perubahan politik dalam pembangunan yang demokratis; menerapkan kebijakan yang *hyper pragmatis* (melalui deregulasi dan debirokratisasi, kebijakan fiskal, swastanisasi dan komersialisasi sektor publik serta membelokkan arah pembangunan ke arah bisnis yang menguntungkan golongan tertentu dan merugikan serta memarginalisasikan kepentingan dan peran rakyat kebanyakan).

Atau dengan kata lain, *divestasi* pembangunan yang bersinergi dengan praktik negatif pembangunan (mengalihfungsikan institusi militer untuk

mempertahankan sistem politik yang sentralistik, otoriter dan tertutup) telah menghasilkan banyak ketimpangan dan penyelewengan yang menyebabkan rapuh dan membusuknya sistem perekonomian, sosial dan politik yang cukup parah di Indonesia, sehingga ketika Krisis ekonomi melanda Indonesia dan negara Asia lainnya, Indonesia lah negara yang paling susah untuk bangkit menata perekonomiannya. Hal ini karena sediaan utang luar negeri Indonesia adalah yang paling besar, cadangan devisa paling rendah dan neraca pembayaran paling buruk (IDEA,2000). Di samping itu, kondisi sosial di Indonesia juga tidak stabil dan banyak terjadinya kerusuhan sosial, banyak deregulasi ganda yang diterapkan pemerintah dan sebagainya, yang menyebabkan banyaknya investor asing menarik investasinya dan ragu-ragu untuk menanamnya kembali di Indonesia. Untuk memperoleh kepercayaan dan investasi kembali Indonesia, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk memenuhi segala persyaratan yang sangat berat dan ketat, seperti keharusan untuk memperbaiki infrastruktur, membuat peraturan yang jelas, prosedur yang sederhana, penegakan supremasi hukum / HAM dan sebagainya.

Dengan demikian, krisis ekonomi yang terjadi dan makin berkembang menjadi krisis multidimensi di Indonesia, di samping karena pembangunan yang dilaksanakan hanya berorientasi ekonomi dengan mengandalkan peningkatan pertumbuhan sektor yang tidak laku jual dan memanfaatkan konsumerisme dikalangan menengah ke atas (dan bukan meningkatkan semangat kewirausahaan), juga karena pembangunan yang dilaksanakan tidak berbasis pada kekuatan sumber daya

manusia yang handal, teknologi dan permodalan sosial di masyarakat, dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya, sehingga mengakibatkan sistem dan pondasi perekonomian, sosial dan politik sangat rapuh dan tidak bisa diandalkan sebagai penyangga perekonomian Indonesia.

2. PEMBANGUNAN DI INDONESIA: PRIORITAS, IMPLIKASI, DAN HASILNYA

Apa yang membedakan Orde Lama dan Orde Baru di dalam pembangunan terletak pada cara keduanya memandang orientasi dan titik konsentrasinya. Orla menekankan pembangunan politik, baik dalam negeri maupun penguatan *bargaining position* politik luar negeri (Feith, 1995:99). Sementara Orba menitik beratkan pada pembangunan ekonomi, sambil sekali-kali melakukan *positioning* politik luar negeri (Arief, 2000 :215). Pembangunan ekonomi Orba terlihat dari keseluruhan arah mekanisme pembangunan yang berlangsung hingga hari ini. Hampir seluruh konstitusi dan produk kebijakan yang dihasilkan Orba memperlihatkan nuansa yang kental dengan pembangunan ekonomi. Hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman Orla dengan pembangunan politik serta penguatan *bargaining position* dengan luar negeri yang menyebabkan kemerosotan sektor ekonomi, sehingga hal ini menjadi inspirasi Orba untuk mengembangkan pembangunan dengan orientasi ekonomi.

Di samping itu, pemilihan model pembangunan ini juga diilhami oleh keberhasilan *Marshall Plan* dalam membantu pembangunan di negara Eropa Barat dan Jepang serta industrialisasi di Inggris, sehingga dalam

pemikiran awal model ini sangat *Eurocentrism* (Hettne, 1991). Paham pembangunan ini melahirkan strategi kapitalis (*state capitalist strategy*), strategi liberal. Model Sofyet dan Keyneisme. Strategi kapitalis merupakan reaksi terhadap paradigma modernisasi, strategi liberal mendasarkan pada mekanisme pasar, industrialisasi bertahap dan perkembangan teknologi. Sedangkan model Sofyet mengembangkan pada kapitalis negara dan aliran Keyneisme merupakan manifestasi dari kapitalisme yang menghendaki campur tangan negara dalam peningkatan ekonomi.

Memang, *Marshall Plan* dan industrialisasi ini membawa banyak kemajuan bagi negara yang bersangkutan dan kemakmuran bagi rakyatnya, sehingga banyak negara yang sedang berkembang (termasuk Indonesia) juga ingin menirunya. Padahal menurut Harlan (1990), kondisi kedua negara ini sangat berbeda. Sewaktu Amerika Serikat melaksanakan rencana *Marshall (Marshall Plan)*, negara-negara di Eropa Barat (betapapun hebatnya kehancuran akibat perang) telah memiliki struktur dan tradisi demokrasi yang berakar dalam, dan telah pula memiliki sumber-sumber daya manusia yang diperlukan untuk membangun kembali negaranya berdasar pola yang demokratis. Struktur, tradisi, dan sumber-sumber daya seperti inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara sedang berkembang, ketika bantuan pembangunan ini mulai dijalankan lebih dari empat dasa warsa yang lalu. Dengan kata lain, pembangunan yang dijalankan negara-negara di Eropa relatif berhasil karena dari segala segi mereka telah siap untuk melaksanakan pembangunan. Sementara itu, pembangunan di negara berkembang

banyak menemui kegagalan karena mereka relatif belum siap dalam menjalankan pembangunan, baik dari segi sumber daya manusianya, struktur kelembagaan, maupun tradisi yang memungkinkan terlaksananya pembangunan tersebut.

Dengan bertitik tolak dari kedua alasan tersebut, maka sejak kelahirannya Orba mulai membangun demokrasi ekonomi dengan membuka pintu modal asing dan menggali sumber daya seluas-luasnya dan hal ini didukung oleh para teknokrat, militer, birokrat, pemilik modal dan masyarakat domestik. Asumsi yang mendasari digunakannya konsep pertumbuhan ekonomi adalah karena sadar bahwa dengan cara ini, keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang rusak akibat kebijakan Orla dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan konsep pertumbuhan yang tinggi diharapkan akan tercipta pemerataan pendapatan (*Trickle Down Effect*) dan satu-satunya cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan industrialisasi, dan ini diwujudkan dengan membangun pabrik-pabrik besar dan modern yang mereka artikan sebagai ungkapan kemajuan dan keberhasilan pembangunan (Myrdal dalam Arief, 2000). Rajesh Candra (1992) menambahkan bahwa industrialisasi dianggap penting karena memiliki keuntungan-keuntungan obyektif sebagai berikut : (1) Bahwa posisi produk manufaktur sektor industri rata-rata mempunyai nilai tukar (*term of trade*) yang lebih tinggi dari produk pertanian. (2) Kenyataan elastisitas permintaan pendapatan (*income demand elasticity*) produk manufaktur sektor industri jauh lebih tinggi daripada produk pertanian. (3) Sektor manufaktur

terbukti lebih efisien dalam memfungsikan sumber daya ekonomi di banding sektor lain.

Bank Dunia (1995) pernah melaporkan bahwa Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 8,5% - 9% pada awal 1997 (sebelum krisis ekonomi). Tetapi keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini ternyata tidak menjamin pemerataan pendapatan, dan konsep *Trickle Down Effect* ternyata dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Polarisasi kepemilikan ekonomi antara kaum bermodal besar dengan kaum bermodal kecil (bahkan tanpa modal) semakin melebar, sehingga mereka yang kaya cenderung makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional (yang tercermin dari kenaikan GNP) ternyata tidak signifikan dengan realita di daerah. Pemerataan pendapatan yang diharapkan tidak pernah terwujud dan justru eksploitasi dan penindasan terus menerus dilakukan oleh daerah berakses ekonomi besar terhadap daerah mayoritas lain yang berakses ekonomi kecil, pelaksanaan pembangunan sering melanggar Hak asasi manusia, pemilik modal berkolusi dengan pemerintah dan atas nama pembangunan sering menggusur dan memposisikan golongan lemah sebagai pihak yang hanya meligitimasi dan mendukung kepentingan mereka. Bahkan sistem industrialisasi yang diterapkan telah mematikan dan atau menurunkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan pendapatan nasional, serta mendepak rakyat dari lapangan kerja sehingga mereka menjadi pengangguran dan hidup dalam kemiskinan. Disamping itu, industrialisasi yang cenderung eksploitatif ter-

hadap sumber alam ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Jadi pembangunan telah gagal menyejahterakan rakyat dan justru memeralat serta menindasnya sehingga mereka hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan dengan segala akibat yang ditimbulkannya.

Sebagai catatan tambahan, Soejadmoko (1987) mengatakan bahwa beberapa sebab lemahnya model pertumbuhan ekonomi adalah : (1) Teori ini tampaknya memisah-misahkan masalah-masalah pembangunan dari realitas kekuasaan politik. Padahal politik memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam pembangunan, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan. (2) Teori-teori ini meremehkan pentingnya faktor kognitif dalam pembangunan dan pertumbuhan. Visi manusia akan masa depan, harapan, ketakutan dan keinginan-keinginannya yang menentukan tindakannya yang sekarang. Kesadarannya akan pengaruh masa lampau ikut pula berperan di dalamnya. (3) Pembangunan ekonomi tidak bisa dipahami secara terpisah, pembangunan ekonomi merupakan suatu bagian dari proses perubahan sosial. (4) Ciri dari model-model pembangunan ini adalah ekadimensi. Perlu disadari bahwa dalam pembinaan bangsa dan pembangunan, kita tidak berhadapan dengan proses yang uni-linear berupa penyelesaian dan pengarahan bangsa secara gradual dan rasional, melainkan dengan diskontinuitas, dengan ketegangan, konflik dan kekacauan. Kita perlu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan atau resiko yang terjadi dalam proses perubahan sosial. Seperti tekanan jumlah penduduk menimbulkan masalah pengangguran, urbanisasi dan fasilitas pendidikan

yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan pentingnya laju pertumbuhan rata-rata yang pesat, terlepas dari sistem politik ekonominya.

Senada dengan pendapat di atas, Meier (1989) menambahkan bahwa pembangunan tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Sedangkan Dudley Seer dalam Mabogonje (1989) mengoreksi bahwa pembangunan tidak semata-mata pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi dimana rakyat di suatu negara memiliki kecukupan pangan dan pekerjaan serta menekan tingkat kesenjangan pendapatan. Mabogonje sendiri mengemukakan empat makna pembangunan, sehingga diperoleh pemahaman dimensi spasial dalam proses pembangunan. Keempat dimensi tersebut adalah pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, modernisasi, pemerataan keadilan dan transformasi sosial ekonomi.

Menyimak beberapa pendapat di atas, tampak bahwa pembangunan tidak lagi dilihat dan dimaknai secara ekadimensi (dimensi pertumbuhan ekonomi semata), melainkan dalam konteks yang lebih luas, sehingga apabila pembangunan yang dilaksanakannya hanya memprioritaskan dimensi ekonomi semata maka dapat mengakibatkan banyaknya distorsi dalam dimensi pembangunan yang lainnya.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG DI DUGA MENYEBABKAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Dengan pengetahuan yang serba terbatas, penulis mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga

menjadi penyebab gagalnya pembangunan di Indonesia.

3.1. Faktor Ketidaksiharian Model Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia berkiblat pada teori dan model ala Barat. Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai *Higher Modernity* yang diterjemahkan dalam bentuk teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang ditempuh dengan industrialisasi. Pemerintah dalam perspektif ini bertindak sebagai subyek yang bertugas mentransformasikan rakyat menjadi obyek, recipient, klien atau partisipan di dalam pembangunan. Jadi yang menjadi dasar dalam pembangunan adalah modernisasi yang memiliki asumsi bahwa tradisional adalah masalah dan harus ditransformasi seperti halnya yang dilakukan negara barat. Atau dengan kata lain feodalisme tradisional dianggap sebagai hambatan yang mengganggu gerak maju masyarakat, sehingga perlu diganti oleh kapitalisme yang lebih progresif. Pembangunan dipahami secara evolusioner berjalan dari tradisional ke modern dan teori ini bertumpu pada akumulasi kapital (investasi dari tabungan) dengan menekankan perlunya utang dan mengadakan dagang dengan luar negeri.

Penerapan model ini mengakibatkan sektor pertanian (yang sebenarnya menjadi sektor andalan Indonesia) menjadi lemah dan tergusur, sehingga kehilangan kontribusinya pada pembangunan, yang juga mengakibatkan membengkaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Industrialisasi dan kapitalisme ini juga menyebabkan krisis lingkungan akibat eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran terhadap sumber daya alam. Disamping itu, dengan akumulasi kapital yang dite-

kankannya mengakibatkan Indonesia terpuruk dalam utang luar negeri yang memperberat beban pembangunan. Kapitalisme yang diterapkan di Indonesia cenderung tidak mempunyai aturan, sehingga banyak praktek monopoli dan persengkokolan antara birokrat/pemerintah dengan pemilik modal. Padahal di Jepang dan negara Eropa lainnya sistem dan aturan main dalam penerapan kapitalisme ini sangat at jelas dan ditujukan untuk ketahanan ekonomi nasional, bukan untuk pemupukan kekayaan perseorangan dan kelompok tertentu sebagaimana yang diterapkan Indonesia. Semestinya industrialisasi yang diterapkan di Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD'45 yang bercorak ekonomi kerakyatan dan menentang segala bentuk monopoli atau penerapan ekonomi liberal.

Dengan demikian, untuk menentukan model pembangunan mana yang relevan untuk diterapkan di Indonesia, kita perlu memahami secara mendalam keterkaitan antara pembangunan dengan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, baik yang berkenaan dengan sistem nilai yang berlaku, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau, karakteristik masyarakatnya yang pluralistik dan latar belakang sejarah yang dimiliki, dan tidak semata-mata mengambil konsep barat yang belum tentu cocok untuk diterapkan di Indonesia karena di dalam banyak hal kondisi di Barat dan di Indonesia jauh berbeda

3.2. Pembangunan Sentralistik Tidak Relevan Diterapkan Pada Masyarakat Indonesia Yang Pluralistik.

Pendekatan yang diterapkan pemerintah di dalam pembangunan di samping bersifat *Top Down* juga

menerapkan pengembangan kelembagaan yang cenderung sentralistik, sehingga program yang dicanangkan relatif seragam (seperti Bimas, Inmas, KUD, Takesra, Kukesra, IDT, KUT dan sebagainya), dengan harapan program-program ini dapat dikendalikan secara nasional. Akibat dari penerapan asas sentralistik ini adalah masyarakat mengalami *depowerment* pranata dan organisasi sosial, yang selama ini menjadi tiang utama kehidupan masyarakat. Dengan demikian, program-program yang dicanangkan pemerintah relatif kurang berhasil karena tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan sering tidak relevan diterapkan, karena tidak sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan yang dimiliki manusianya yang cenderung berbeda satu sama lain di tiap daerah.

Mengingat bahwa masyarakat juga memiliki potensi, kebutuhan dan bersifat pluralistik, maka dalam rangka melaksanakan pembangunan harus dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan potensi daerah, dan ini hanya mungkin jika diterapkan program pembangunan yang lebih desentralisasi yang berpijak pada kondisi lokal (lokalistik). Di samping itu dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu memperhatikan keragaman budaya, lingkungan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta menjunjung tinggi martabat dan kebebasan manusia dan masyarakat.

3.3. Distorsi Pembangunan Terjadi Akibat Pembangunan Yang Dijalankan Bersifat Ekadimensi

Pembangunan yang dijalankan pada masa Orba gagal karena hanya mementingkan aspek/dimensi ekonomi (ekadimensi) dan mengabaikan aspek/dimensi lainnya. Hal ini karena pem-

bangunan itu bersifat multidimensi, sehingga penekanan di salah satu dimensi akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan atau distorsi pada dimensi lainnya, yang secara esensial punya andil yang sama dalam pembangunan.

Konsep pertumbuhan ekonomi justru menjadi bumerang yang menikam balik bangsa Indonesia, sebab pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan ternyata diikuti masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi yang ikut naik, eksploitasi yang cenderung meningkat dari negara maju terhadap negara terbelakang (akibat utang), kerusakan lingkungan yang cukup parah dan mengancam kehidupan umat manusia akibat eksploitasi secara besar-besaran terhadap SDA. Ini bukan berarti pembangunan ekonomi tidak diperlukan. Dalam proses perubahan, pembangunan ekonomi tetap dilaksanakan tetapi dengan mengupayakan keterpaduan sektor lain di dalam pembangunan (politik, sosial, budaya), sehingga distorsi pembangunan dapat dihindari dan pembangunan lebih bersifat manusiawi, di mana manusia ditempatkan sebagai unsur sentral dari pembangunan itu sendiri.

3.4. Indonesia Terjerat Pada Masalah Utang Luar Negeri Yang Membebani Pembangunan.

Sesuai teori dan model pembangunan yang dianut, mendorong Indonesia untuk melakukan hutang guna membiayai pembangunan / industrialisasi yang dilaksanakannya. Mencari utang adalah hal yang wajar dan bukan merupakan suatu kesalahan, jika dalam keputusan mengambil utang itu mempertimbangkan kapasitas yang dimilikinya (mempertimbangkan manfaat utang dan kemampuan untuk

membayarinya. Sisi negatif pembuatan utang luar negeri oleh pemerintah menurut Hancock dalam Sritua Arief (1998) adalah sebagai berikut : (1) Utang luar negeri cenderung mendorong pemerintah untuk bersikap santai dalam menggalang tabungan domestik tetapi cenderung sangat boros dalam mengalokasikan pengeluaran untuk tujuan komersial. (2) Utang luar negeri cenderung dipergunakan pemerintah untuk mempertahankan nilai kurs mata uang yang *overvalued* sehingga mendorong dilakukannya impor secara besar-besaran untuk tujuan konsumtif. (3) Sebagian besar dana utang luar negeri harus dibelanjakan di negara-negara pemberi utang (membeli barang dan jasa yang harganya sulit dikontrol oleh negara pengutang). Utang luar negeri ini cenderung digunakan oleh pemberi utang sebagai alat untuk menguras kekayaan negara-negara pengutang. (4) Utang/bantuan luar negeri memunculkan masalah baru yang rumit bagi negara berkembang, karena jumlahnya terus membengkak akibat bunganya yang terus bertambah. Pemberian pinjaman dana pembangunan kepada negara terbelakang ini sedikit atau banyak berimplikasi pada pengadopsian atau penginovasian perspektif, model atau pendekatan pembangunan dari negara donor. Bahkan hal ini merupakan semacam kewajiban bagi negara berkembang sebagai kompensasi atas bantuan yang diterimanya. Permasalahan yang muncul adalah karena seringnya perspektif, model dan pendekatan itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi negara berkembang. Di samping itu, bantuan luar negeri itu biasanya diikuti dengan aturan dan persyaratan yang sangat berat dan ketat serta dikaitkan dengan pola

dengan pola hubungan di bidang bantuan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan yang justru memunculkan masalah baru dan banyak merugikan negara penerima bantuan.

Kegagalan dalam mengantisipasi dampak negatif dari utang luar negeri telah menghempaskan perekonomian nasional Indonesia ke dalam perangkap utang. Sebagai gambaran, pada tahun 2001 jumlah utang yang dimiliki Pemerintah Indonesia dan Swasta mencapai US \$ 150 milyar. Angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar pemerintah adalah sekitar 40 trilyun rupiah. Jika ditambah dengan bunga

utang dalam negeri sebanyak 53,4 trilyun rupiah, makasekitar 30 % belanja negara Indonesia menguap begitu saja untuk membayar utang. Padahal masyarakat masih sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk mengatasi masalah mereka. Beberapa data menunjukkan rendahnya tingkat kehidupan sosial rakyat Indonesia seperti data tentang penduduk miskin dan pengangguran yang masih meliputi sekitar 36% dari jumlah seluruh angkatan kerja. Sediaan utang luar negeri pada periode 1994-1998 (dalam milyar \$ AS) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Utang Luar Negeri Indonesia Periode 1994-1998

Jenis Utang	1994	1995	1996	1997	1998
Utang Jangka Panjang	88,367	98,432	96,710	97,119	128,594
Utang Jangka Pendek	19,457	25,966	32,230	36,004	13,092
Kredit IMF	-	-	-	2,970	9,200
Total	107,824	124,398	128,940	136,173	150,886

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 1997-1998.

Melihat tabel di atas, jelas bahwa permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia berkenaan dengan hutang yang dimilikinya sangat serius dan butuh penanganan yang sungguh-sungguh, sebab dapat membahayakan integritas bangsa dan negara. Sebagai gambaran tambahan, RAPBN 2003 mengisyaratkan, bahwa kemampuan negara hanya dapat melunasi cicilan pokok bantuan luar negeri untuk dua tahun kedepan dan tahun ketiga sudah tidak mampu membayarnya, walau bunganya sekalipun (Kompas, 18 Agustus 2002).

Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat layak bagi

Indonesia untuk dimasukkan dalam daftar negara miskin pengutang berat (*highly indebted poor countries*) yang berhak untuk mendapatkan penghapusan/keringanan hutang (*debt relief*) agar pembangunan yang dijalankan berlaku normal. Tetapi Bank Dunia menolaknya karena memiliki prediksi bahwa pada akhir 2000 persediaan utang luar negeri Indonesia akan menurun dan hanya tinggal US \$ 103 milyar, pada tahun 2010 tinggal US \$ 53 milyar. Padahal dalam kenyataannya proyeksi tersebut sangat melesat jauh, mengingat pada tahun 1998 saja hutang tersebut sudah mencapai US \$ 150 milyar.

4. PEMBANGUNAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PRADIGMA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan, bahwa dalam mengupayakan kemajuan (modernisasi) dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ORBA dengan tegas menggunakan developmentalisme dengan paradigma ekonominya sebagai sebuah ideologi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Akibatnya, developmentalisme benar-benar menghegemoni dan menjadi diskursus ORBA yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga dan mewarnai seluruh arah pelaksanaan pembangunan, konstitusi dan produk kebijakan yang dihasilkannya.

Pembangunan ekonomi yang diterapkan Orba sekilas memang tampak mengesankan, sebab dalam kurun waktu ± 15 tahun dapat menekan inflasi 10 % dan mengontrol pertumbuhan GNP Indonesia sebesar 8-9% per tahun dan pendapatan perkapita mencapai US \$ 560, meningkatnya industri manufaktur, meningkatnya konsumerisme tinggi di kalangan masyarakat dan timbulnya masyarakat kelas menengah ke atas diperkotaan, yang kesemua itu merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Prestasi ini dapat memindahkan Indonesia dari kelompok negara miskin ke kelompok negara berpenghasilan menengah. Ironisnya pertumbuhan itu hanya baik di permukaan dan dinikmati oleh sebagian kecil rakyat/ golongan tertentu, dan stabilitasi politik yang dianggap sebagai prasyarat mutlak untuk melakukan pembangunan justru mengalami *depolitisasi* dan *deideologisasi*. Akibatnya sikap kritis dan kemampuan reflektif rakyat yang semestinya merupakan sarana

kontrol lajunya pembangunan kurang berfungsi. Sementara korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan ketimpangan-ketimpangan lainnya mewarnai kehidupan masyarakat. Masyarakat benar-benar kehilangan keberdayaannya (*deempowerment*) akibat penerapan sistem sentralistik dan dominatif yang dikendalikan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pembangunan ekonomi yang semula dianggap dapat memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, dalam pelaksanaan dan hasilnya ternyata sarat dengan penyimpangan-penyimpangan, sehingga justru memperparah permasalahan-permasalahan yang telah ada dan mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan baru di Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi justru memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok miskin dan kelompok elit, persebaran hasilnya tidak merata (terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, seperti pusat pemerintahan) sehingga banyak menimbulkan kecemburuan sosial bagi daerah lain, memicu terjadinya kerusuhan sosial dan konflik berkepanjangan di berbagai wilayah RI, yang semua itu mengancam terjadinya disintegritas bangsa. Di samping itu, pembangunan yang dilaksanakan juga diiringi dengan meningkatnya masalah kemiskinan, pengangguran, marginalisasi, ketidakmampuan sosial (*social ability*), pengungsian dan sebagainya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dengan demikian, paradigma pembangunan ekonomi yang diperkuat oleh kekuatan politik dan militer yang cenderung *represif* sebagaimana dit-

erapkan ORBA perlu ditinjau dan dipikir ulang (*reorientasi and rethinking*) kembali. Dan sebagai alternatif pemecahan, dapat direkomendasikan paradigma pembangunan sosial untuk diterapkan pelaksanaannya di Indonesia, sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bahasan selanjutnya.

4.1. Pembangunan Sosial : Pengertian, Elemen, dan Perspektif yang Mendasarinya

Pembangunan Sosial menurut Midgley (1995 : 25), diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial ini menurut istilah UNDP (1993) disebut dengan pembangunan manusia yang pada dasarnya merupakan pembangunan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sedangkan ESCAP (1992) menyebutkan, bahwa pembangunan sosial terdapat pada tiga tingkatan komponen yaitu : a). individu, keluarga dan komunitas, b). masyarakat sipil dan c). kelembagaan negara dan memiliki empat dimensi, yaitu struktur sosial, dimensi sosial, proses sosial dan nilai sosial yang ada pada suatu masyarakat.

Lebih lanjut, Midgley (1995) menjabarkan delapan elemen dari pembangunan sosial, yaitu : (1) Proses perubahan sosial berkaitan dengan pembangunan ekonomi, aspek ini yang memberikan pembangunan sosial suatu karakter unik bila dibandingkan dengan pendekatan institusional yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. (2) Pembangunan sosial ini mempunyai fokus interdisiplin yang

mengembangkan pengetahuan berbagai jenis ilmu sosial. (3) Konsep dari Pembangunan Sosial memerlukan suatu proses. (4) Proses perubahan yang terdapat dalam pendekatan pembangunan sosial pada dasarnya bersifat progresif. (5) Proses pembangunan sosial adalah proses intervensi. (6) Tujuan pembangunan sosial diusahakan dapat dicapai melalui beberapa strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung. (7) Hubungan sosial lebih memusatkan pada populasi sebagai suatu kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik. (8) Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ahli lain, Cox (2001: 2-3) mencoba melihat keterkaitan antara pembangunan sosial dengan berbagai sistem (domain) yang ada di masyarakat yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pembangunan sosial. Kelima domain yang dimaksud meliputi : domain sosial, domain ekonomi, domain politik, domain hukum dan domain budaya.

Adapun perspektif dari pembangunan sosial ini didasarkan isu-isu yang diangkat dalam KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1995 dan KTT Pembangunan Sosial Kopenhagen +5 tahun 2000. Pada KTT Kopenhagen tahun 1995, tiga isu yang diangkat berkenaan dengan masalah pengurangan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja produktif dan penguatan integrasi sosial. Sedangkan KTT Kopenhagen +5 tahun 2000, mengangkat isu mengenai dampak positif dan negatif globalisasi terhadap manusia, meminta perhatian negara terhadap penghapusan utang, peningkatan program *Official development Assistance* (ODA), upaya mengatasi HIV / AIDs pandemic, dan mendesak 10 komitmen

Pembangunan Sosial untuk ditindaklanjuti dalam program nyata. Sepuluh komitmen yang merupakan hasil KTT Kopenhagen tahun 1995 tersebut adalah: (1) Menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan hukum yang mendukung pembangunan sosial. (2) Menghapuskan kemiskinan sebagai suatu keharusan etik, sosial, politik dan ekonomi. (3) mendayagunakan seoptimal mungkin tenaga kerja sebagai dasar prioritas bagi kebijakan ekonomi dan sosial serta memungkinkan semua orang mendapat kepastian dan kesinambungan mata pencaharian melalui kebebasan memilih pekerjaan yang produktif. (4) Meningkatkan integrasi sosial dengan membantu mewujudkan perkembangan masyarakat yang mapan, aman dan pasti serta didasarkan pada HAM, non diskriminasi, toleransi, mengakui perbedaan, persamaan kesempatan, solidaritas, keamanan dan partisipasi dari semua pihak. (5) Meningkatkan martabat manusia, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. (6) Meningkatkan persamaan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, standar kesehatan yang optimal dan penghapusan perbedaan kondisi sosial (tanpa membedakan ras, bangsa, jender, umur atau kecacatan) serta menghormati budaya bersama dan budaya masing-masing. (7) Mempercepat pembangunan ekonomi, sosial dan SDM di Afrika dan negara-negara kurang berkembang. (8) Mengintegrasikan kebijakan sosial dalam program penyesuaian struktural. (9) Meningkatkan secara nyata dan atau memanfaatkan sumber dana yang dialokasikan untuk pelayanan sosial secara lebih efisiensi. (10) Meningkatkan kerjasama internasional, regional dan subregional bagi pembangunan sosial, dengan semangat

kemitraan melalui PBB dan lembaga multilateral lainnya.

Adapun program aksi dari Pembangunan sosial menggariskan kebijakan, program-program dan langkah-langkah untuk melaksanakan semua komitmen atas dasar prinsip dan sasaran yang meliputi hal-hal berikut : (1) Pembangunan yang berpusat pada manusia (*People Centered Development*); (2) Tanggungjawab nasional (*National Responsibility*); (3) Kebijakan yang terintegrasi (*Integrated Policy*); (4) Kebijakan ekonomi (*Economic Policy*); (5) Berbasis keluarga dan komunitas (*Family and Community Based*); (6) Hak Asasi Manusia untuk semua (*Human Right for All*); (7) Penentuan nasib sendiri (*Self Determination*); (8) Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*); (9) Keumuman (*Universality*); (10) Memberi kesempatan kepada yang lebih senior (*Social Opportunity for Old Age*); (11) Aksesibilitas teknologi (*Technology Accesibility*); (12) Pengembalian Pengungsi (*Refugee Repatriation*)

Program aksi dari pembangunan sosial yang dilaksanakan meliputi : a). lingkungan yang mendukung pembangunan sosial. b). Penuntasan kemiskinan. c). Perluasan lapangan kerja yang produktif dan pengurangan jumlah pengangguran.d). Integrasi Sosial e).Pelaksanaan dan tindak lanjut.

4.2. Tujuan dan Strategi Pembangunan Sosial.

Tujuan utama dari pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial, kualitas kemandirian, dan rasa aman yang semakin baik untuk semua orang. Atau dengan kalimat lain dapat dikatakan, bahwa tujuan dari pembangunan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Spicer (1995), mengemu-

kakan bahwa kesejahteraan sosial meliputi lima bidang, yaitu : kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial. Sedangkan Zastrow (1996), sebagaimana dikutip Adi (2002) menambahkan bidang rekreasional sebagai bidang dari kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut ESCAP tahun 1992 untuk ESCAP Regional menuju tahun 2000 dan seterusnya, tujuan dan sasaran dari pembangunan sosial adalah : Menghapus kemiskinan, merealisasikan distribusi keadilan dan Meningkatkan partisipasi rakyat.

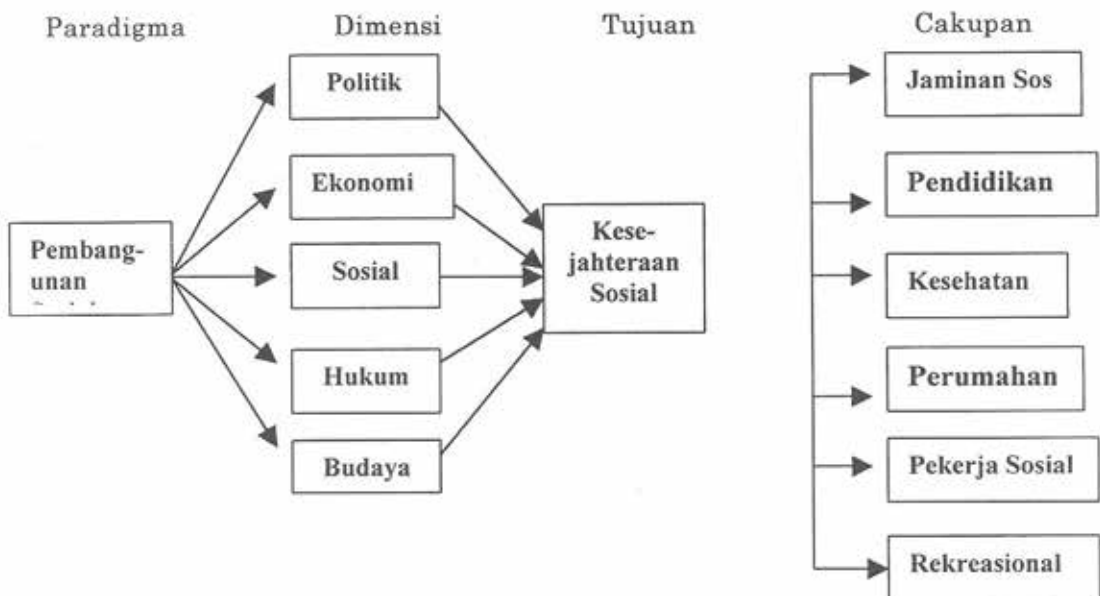
Adapun strategi dalam pembangunan sosial menurut Midley (1995) meliputi tiga hal, yaitu :

- Pembangunan sosial melalui individu (*Social Development by Individu*)
- Pembangunan sosial melalui komunitas (*Social Development by Community*)
- Pembangunan sosial melalui pemerintah (*Social Development by Government*).

Ketiga strategi tersebut berada dalam level pembangunan pada tingkat mikro, mezzo dan makro.

Apabila Paradigma pembangunan sosial sebagaimana telah diuraikan di atas disederhanakan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

Bagan Tentang Paradigma Pembangunan Sosial



Sumber : Midgley (1995), Cox(2001), Spicer (1995), Zastrow (1996),Adi(2002), dengan modifikasi dari penulis.

4.3. Keterkaitan Antara Pembangunan Sosial, Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Reorientasi Paradigma.

Pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan Kesejahteraan sosial dalam arti luas. Artinya, pembangunan sosial dapat dipandang sebagai suatu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (atau kondisi sosial yang diharapkan). Atau dengan kata lain, pembangunan sosial dapat dilihat sebagai suatu pendekatan untuk mengelola suatu permasalahan sosial, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memperoleh kemajuan atau manfaat yang ditetapkan serta dapat diterapkan dalam elemen individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan situasi sosial yang lebih luas.

Implementasi dari paradigma pembangunan sosial yang konsep utamanya digali dari ide kesejahteraan sosial ini mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ditegakkannya HAM, pelaksanaan *Good Governance*, demokratisasi, partisipasi aktif, pengu-

tan lembaga masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penyelenggaraan negara dengan titik tekan manusia sebagai pusat dari pembangunan (*people centered development*). Dengan demikian, maka paradigma pembangunan kesejahteraan sosial yang dipakai dalam pembangunan konvensional, tidak relevan lagi untuk dilanjutkan, sebab berorientasi pada penanganan masalah konvensional, pelayanan dalam skala kecil, didominasi oleh pemerintah, pola pelayanan menggunakan pendekatan residual sehingga cenderung bersifat reaktif dan hanya mengatasi gejala yang terjadi secara temporer tanpa mampu menjangkau hal-hal esensial yang menjadi akar permasalahan. Jadi dengan dipakainya paradigma pembangunan sosial yang berimplikasi pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial ini, membawa konsekuensi pada perlunya dilakukan pergeseran paradigma pembangunan kesejahteraan sosial, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. Reorientasi Paradigma Pembangunan Sosial.

No	Paradigma Konvensional	Paradigma Baru
1	Pelayanan bersifat <i>makro</i>	Bersifat <i>mikro</i> , sesuai hakikat permasalahan yang dirasakan kelompok <i>grassroot</i> .
2	Pelayanan bersifat <i>reaktif</i>	Pemberdayaan (<i>empowerment</i>) yang bersifat proaktif partisipatif.
3	Pelayanan bersifat <i>sentralistik</i>	<i>Desentralistik</i> , sesuai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berada di daerah.
4	Pelayanan bersifat kelembagaan / birokrat	Pemberdayaan masyarakat yang bersifat <i>holistik integratif</i> .
5	Pelayanan berorientasi pada pencapaian target	Mengutamakan proses
6	Pelayanan Bersifat <i>Top Down</i>	Bersifat <i>Bottom Up</i>
7	Pelayanan bersifat <i>Simptomatis</i>	Menjangkau akar permasalahan
8	Mengutamakan modal ekonomi	Mengutamakan <i>social capital</i>

Sumber : diolah dari beberapa sumber

Di samping pergeseran dalam pelayanan, agar tujuan pembangunan sosial dapat tercapai juga diperlukan pergeseran peran pemerintah yang semula berfungsi sebagai birokratis kearah fungsinya sebagai perumus kebijakan dan pemberi fasilitas terhadap peran masyarakat (*sterring*) serta evaluator dalam rangka memberdayakan masyarakat. Pergeseran peran pemerintah ditandai dengan perbaikan mekanisme kerja, penataan perijinan, peningkatan sistem pelayanan dan penyempurnaan metodologi penanganan masalah secara profesional.

Disamping itu, pemerintah juga perlu menerapkan pendekatan yang relatif fleksibel dan partisipatoris dan mendasarkan pada asas desentralisasi yang merupakan indikasi dari mulai berkembangnya iklim demokratis dalam memberdayakan masyarakat sipil. Dengan keberdayaannya ini diharapkan masyarakat mampu memobilisasi potensi yang ada pada diri dan lingkungannya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara mandiri, makin berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan serta mampu menampilkan sikap kritis dan analitisnya terhadap pembangunan yang dirasakannya sebagai kebutuhan.

5. PENUTUP

Konsep, kebijakan dan strategi pembangunan sosial sebagaimana dipaparkan diatas sangat relevan diterapkan dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama dalam mengatasi dampak krisis multidimensional yang berkepanjangan yang menyebabkan meningkatnya penduduk miskin dan pengangguran, kesenjangan yang makin melebar antara berbagai lapis-

an masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, merebaknya kerusuhan sosial yang mengancam disintegritas bangsa dan permasalahan sosial lainnya yang lebih kompleks.

Konsep pembangunan sosial dalam segala implementasinya ini merupakan koreksi terhadap kegagalan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi ekonomi dan didukung kekuatan militerisme sebagaimana diterapkan oleh ORBA dalam mekanisme penyelenggaraan negara yang sarat dengan praktek KKN dan segala bentuk penyimpangan lainnya, mengabaikan pembangunan sosial, sehingga pembangunan yang dilaksanakan melahirkan distorsi di segenap aspek kehidupan, serta tidak mensejahterakan rakyat yang menjadi sasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adie, Isbandi.R, 2002. *Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Arief, Budiman, 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arief, Saiful, 2000. *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, 1994. *Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan
- Arief, Sritua, 1998. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: LPSM- Zaman Wacana Mulia.
- Bank Indonesia, *Laporan Bank Indonesia*, Jakarta (Beberapa Tahun Terbitan).

- Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia* (Beberapa Tahun Terbitan).
- Chaniago, A. andrinof, 2001. *Gagalnya Pembangunan Kajian Ekonomi Terhadap Akar Krisis di Indonesia*, Jakarta : LP3ES.
- Feith, Herbert, 1998. *Soekarno - Hatta Dalam Ekonomi Terpimpin*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Harlan, L dan Mochtar Lubis, 1990. *Masa Depan Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Institute Of Development And Economic Analysis (IDEA), 2000. *Nestapa Pembangunan Sosial*, Yogyakarta : Yayasan Litera Indonesia.
- Kompas, 18 Agustus 2002 *Tentang Beban Utang Luar Negeri Indonesia*
- KTT Pembangunan Sosial Kopenhagen Tahun 1995*
- KTT Pembangunan Sosial Kopenhagen *5 Tahun 2000.*
- Mabogunjo, AL, 1989. *The Development Process : a Spatial Process, 2 nd Edittion*, London : Orwn Hyman, Ltd.
- Meier, GM, 1989. *Leading Issues in Economic Development, 5nd Edittion*. New York : Oxford University Press.
- Midley, James, 1995. *Social Development, the Developmental Perspective in Social Welfare*. London : Sage Publications.
- Oxfam International Positioning Paper, 1998. *Making Debt Relief Work : A test of Political Will*.
- Seer, Dudley, 1969. *The Meaning Of Development, International Development Review*, New York.
- Soejadmoko, 1987. *Nilai-nilai Tradisional Dalam Proses Pembangunan dalam Collet, NJ dan Umar Khayam (penyunting), Kebudayaan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Utama
- Sugiyono, M, 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- UNDP, 1993. *Human Development Report 1993*, Oxforp University Press.
- World Bank, 1995. *Indonesia : From Crisis to Oppurtunity*, Washington DC.
- World Bank, *World Development Report*, Washington DC (Beberapa Tahun Terbitan).
- Yahya, Suyono, 2000. *Paradigma Baru Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial*, Keynote Adress Menteri Negara Masalah Kemasyarakatan dan Kepala BKSNI Pada Semnas , 5 Februari 2000.
- Zastrow, Charles, 1996. *Introductions to Social Work and Social Welfare*. 6 th edittion. Pacific Grove : Brooks / Cole Publishing Company.